PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Eka Merlinda Sari
07011181419057

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
OKTOBER 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN *TAHUN 2017*

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

EKA MERLINDA SARI
NIM. 07011181419057

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2018

Pembimbing I

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 02 Oktober 2018.

Indralaya, 02 Oktober 2018

Ketua:

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001 .....

Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003 .....

2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004 .....

3. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003 .....

Mengetahui:

Dekan FISIP	**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si	**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**
NIP. 196311061990031001	**NIP. 198108272009121002**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Kesabaran itu ada dua macam ; sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan" (Ali bin Abi Thalib)

"Sabar dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan" (Eka Merlinda Sari)

Kupersembahkan untuk :

1. **Kedua orangtuaku yang selalu mendo'akan dan mendukungku**
2. **Adik-adikku tersayang Heni Yovita Sari dan Doni Mahendra**
3. **Keluargaku**
4. **Teman-temanku**
5. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'aliakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad, Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017".** Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini telah begitu banyak memberi motivasi, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui kesempatan berbahagia ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dukungan, saran dan bantuan apapun yang sangat besar bagi Penulis. Ucapan terima kasih terutama Penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak dan Ibu, yang senantiasa mendo'akan, dan selalu memberikan motivasi, dukungan, serta yang selalu menjadi penyemangat Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini,
2. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan, Bapak Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian, Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ermanovida, S.sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI,
5. Dra. Tuty Khoirunnisyah, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ermanovida, S.sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini,
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
8. Bapak dan Ibu di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan data, fasilitas dan waktunya,
9. Sahabat-sahabatku Mei Ayu Tiara, Dhea Rizky dan Dessy Kumalasari yang selalu menyemangati dan memberikan keceriaan,
10. Teman-teman satu angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya,

11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Skripsi ini, namun semuanya tidak akan terlepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Inderalaya, Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Fokus penelitian ini menggunakan konsep siklus anggaran menurut Soleh dan Rochmansjah, meliputi perencanaan anggaran, pembahasan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 sudah cukup baik, namun dari keempat dimensi yang menjadi indikator penulis dalam menganalisis Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan terdapat satu indikator yang belum berjalan dengan baik, yaitu indikator perencanaan anggaran program dan kegiatan. Pada indikator perencanaan anggaran program dan kegiatan dasar pedoman yang digunakan hanya berpedoman pada Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah saja dan belum berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.94/PMK 02/2017 Tentang Penunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga yang memuat lebih rinci lagi mengenai penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Kata kunci : Pengelolaan Anggaran

ABSTRAC

This research is entitled, "Budget Management of Programs and Activities in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province in 2017". The background to the selection of titles in this study is the management of budget programs for office administration services and programs for improving the facilities and infrastructure of the apparatus that have not been realized to the maximum, marked by a budget absorption of only 0%. This study aims to get an overview of how the Program and Activity Budget Management in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province 2017. The type of research in this thesis is descriptive, using qualitative research methods. The type of data used is primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through documentation, observation and interviews. The focus of this study uses the concept of the budget cycle according to Soleh and Rochmansjah, including budget planning, discussion and determination of the budget, implementation of the budget and budget accountability. The results showed that the Budget Management of Programs and Activities in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province in 2017 was good enough, but from the four dimensions that became the indicator of the author in analyzing Program and Activity Budget Management at the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province there is one indicator that is not yet running well, namely the program and activity budget planning indicators. The budget planning program and basic activity indicators used are based only on the Ministry of Home Affairs Regulation No. 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management and have not been guided by the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number. 94 / PMK 02/2017 concerning Guidance for Preparation and Review of Work Plans and Budgets of the State Ministries / Institutions which contains more details regarding program and activity budgeting.

Keywords : Management of Budgetting

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
HALAM PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRAC ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**
DAFTAR ISTILAH ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitain 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LandasanTeori 10
1. Administrasi Keuangan Negara 10
2. Anggaran 13
3. Pengelolaan 20
4. Pengelolaan Anggaran 23
5. Tujuan Pengelolaan Anggaran 28
6. Arah Pengelolaan 29
7. Program 29
8. Kegiatan 31
B. PenelitianTerdahulu 31
C. KerangkaPemikiran 33

BAB III MetodePenelitian

A. Jenis Penelitian 35
B. Definisi Konsep 35
C. Fokus Penelitian 36
D. Jenis dan Sumber Data 37
E. Informasi Penelitian 38
F. Teknik Pengumpulan Data 38
G.Teknik Analisis Data 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....41
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan.....41
2. Sejarah Singkat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.Sumsel 44
3. Visi dan Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.Sumsel.....45
4. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.Sumsel .45
5. Tugas Pokok Dan Fingsi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.....47
B. Pembahasan 56
1. Perencanaan Anggaran Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah SETDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 56
2. Pembahasan dan Penetapan Anggaran Program dan Kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel.....71
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel 76
4. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Privinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 87
B. SARAN.....89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Daftar Program/Kegiatan dan Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 4
2. Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 5
3. Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 6
4. Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 6
5. Program yang Tidak Terealisasi Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 7
6. Penelitian Terdahulu 33
7. Fokus Penelitian 39
8. Daftar Jumlah Penduduk Sumatera Selatan dari Tahun ke Tahun 45
9. Pelaksanaaan Anggaran Belanja Langsung APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 80
10. Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan Belanja Langsung APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Pemikiran 36
2. Peta Provinsi Sumatera Selatan 44
3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel 47
4. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 48
5. Perencanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel 62
6. Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 66
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/BPKAD/2016 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2017 67
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KTSP/BPKAD/2016 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 68
9. Daftar Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel 73
10. Tahapan Pencairan Anggaran 76

DAFTAR SINGKATAN

AAPSI	: Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
ABT	: Anggaran Biaya Tambahan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pemeriksa Keuangan Dan Aset Daerah
DISPENDA	: Dinas Pendapatan Daerah
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPA-SKPD	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
DUK	: Daftar Urut Kepangkatan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GU	: Ganti Uang
KAB	: Kabupaten
KDH	: Kepala Daerah
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LS	: Belanja Langsung
LPPD	: Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
PMK	: Peraturan Meteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAS	: Pagu Plafon Anggaran Sementara
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PROV	: Provinsi
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis

RI	: Republik Indonesia
RKA	: Rencana Kerja Dan Anggaran
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RLPPD	: Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
SETDA	: Sekretariat Daerah
SIMDA	: Sistem Manajemen Keuangan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SUMSEL	: Sumatera Selatan
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TH	: Tahun
TU	: Tambah Uang
UU	: Undang-Undang
WKDH	: Wakil Kepala Daerah

DAFTAR ISTILAH

Actuating	: Penggerakan
Budgeting Reform	: Reformasi Anggaran
Balance Budget	: Anggaran Berimbangan
Cash Flows	: Aliran Kas
Coalition Building	: Koalisi Membangun
Controlling	: Pengawasan
Financial Management	: Manajenen Keuangan
Financial Planning	: Perencanaan Keungan
Feed Back	: Umpan Balik
Good Public	: Masyarakat yang baik
Good Governance	: Pemerintah yang Baik
Input	: Masukan
Integrated Financial Administration	: Administrasi Keuangan Terpadu
Salesmanship	: Kepandaian berjualan
Managing Assets	: Mengelola Aset
Managerial Skill	: Manajer Terampil
Meeting Special Problems	: Penangan Masalah Khusus
Moneter	: Berhubungan Dengan Uang Atau Keuangan
Non Moneter	: Tidak Berhubungan Dengan Uang
Organizing	: Pengorganisasian
Output	: Keluaran
Planning	: Perencanaan
Planning Tool	: Alat Perencanaan
Performance Financial Administration	: Administrasi Keuangan Hasil Karya
Political Skill	: Keterampilan Politik
Public Administration	: Administrasi Negara
Raising Funds	: Penggalangan Dana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Tugas Penunjuk Pembimbing Skripsi 94
2. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 95
3. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2 96
4. Surat Permohonan Izin Penelitian 97
5. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari Instansi Terkait 98
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 99
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK. 02/2017 Tentang Penunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 123
8. Pedoman Wawancara 149
9. Dokumentasi Foto Penelitian 152

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara dari semua urusan pemerintahan. Pemerintah daerah itu sendiri di pimpin oleh seorang Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan dan kepentingan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien.

Pada pemerintah daerah, semua urusan dan kepentingan yang ada dalam pemerintahan tersebut di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi landasan atau pendoman dalam pengelolaan keuangan di suatu pemerintahan

daerah dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya sama dengan tujuan dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran peting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tertera dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (PP 24 tahun 2005). Disamping undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 tahun 2007. Kemudian terakhir kali diubah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kata lain, semua

peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seiring bergulirnya Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), maka terbentuklah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang merupakan unsur staff dalam Tata Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga susunan Organisasi yang semula terdiri dari 4 Asisten dan 12 Biro berubah menjadi 3 Asisten dan 8 Biro.

Terbentuknya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menunjukan kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang penting, sementara itu pemerintah selaku pelayan masyarakat harus dapat memberikan pelayanan prima berdasarkan demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah didukung oleh Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan, artinya setiap bidang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya harus dianggarkan pagu

dana yang telah disetujui dan disyahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat rencana kerja dan program kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017:

Tabel 1 Daftar Program/Kegiatan dan Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan
I.	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	b. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
	c. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Derah, Luar Daerah dan Luar Negeri
II.	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
	a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
III.	**Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
	a. Verifikasi Pengganti Antar Waktu Dprd Provinsi/Kab/Kota
IV.	**Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH**
	a. Penyususnan Laporan Penyelenggaraan Pemerintad Daerah (LPPD)
	b. Penyususnan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan
	c. Penyelenggaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
	d. Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Ketua/Anggota DPRD Prov,Sumsel Ke Luar Negeri
	e. Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan KDH/WKDH
	f. Pembinaan Dan Deks Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
V.	**Penataan daerah otonom baru**
	a. Fasilitas Penyiapan Data Dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah
	b. Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Atar Daerah
	c. Pembakuan Nama Rupa Bumi
	d. Pengukuran, Pemerataan Dan Pemasangan Pilar Permanen Atar Provinsi
	e. Pengukuran, Pemerataan Dan Pemasangan Pilar Permanen Atar Kabupaten/Kota
	f. Pembinaan Regulasi Otonomi Daerah Prov.Sumsel Tentang Urusan Konkruen Pasca Penetapan UU 23 Tahun 2014
	g. Pembinaan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Di Daerah Otonomi Baru
VI	**Kerjasama Wilayah Perbatasan**
	a. Pembinaan Dan Pemantauan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Daerah Prov. Sumsel

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel

Tabel diatas merupakan program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017. Dimana, program dan kegiatan tersebut dibuat dan direncanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) merupakan orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat, mengusulkan dan merencanakan program atau kegiatan yang akan dibuat dan di anggarkan. Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa ada 6 program dan 19 kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 dapat dilihat bahwa pengelolaan anggaran menjadi suatu hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun selalu menargetkan 100% untuk program-program yang telah direncanakan dapat terealisasi. Akan tetapi, pada kenyataannya program-program yang telah direncanakan tersebut belum bisa merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini adalah laporan realisasi keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015:

Tabel 2 Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	347.620.000	329.319.100	94,73
2.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	660.200.000	658.250.684	99,70
3.	Penataan Daerah Otonom Baru	188.000.000	187.908.505	99,95
4.	Kerjasama Wilayah Perbatasan	705.000.000	691.154.170	98,03
	Jumlah	1.900.820.000	1.866.632.459	98,20

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Tabel diatas merupakan laporan realisasi anggaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dapat dilihat terdapat empat program kerja dengan jumlah pagu dana pada sebesar 1.900.820.000 *(satu milyar sembilan*

ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 98,20% dengan target 100% dan dapat dilihat bahwa program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menjadi program dengan realisasi keuangan yang paling rendah hanya menyerap anggaran sebesar 94,73%. Sedangkan program Penataan Daerah Otonom Baru menjadi program yang paling baik menyerap anggaran dengan realisasi sebesar 99,95%.

Tabel 3 Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	178.043.600	177.603.600	99,75
2.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	1.886.409.420	1.885.844.803	99,97
3.	Penataan Daerah Otonom Baru	48.957.700	48.957.700	100
4.	Kerjasama Wilayah Perbatasan	202.914.280	202.393.200	99,74
	Jumlah	2.316.325.000	2.314.799.303	99,93

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel realisasi keuangan diatas dapat dilihat bahwa program Kerjasama Wilayah Perbatasan menjadi program dengan realisasi keuangan yang paling rendah dengan hanya menyerap anggaran sebesar 99,74%. Sedangkan program Penataan Daerah Otonom Baru menjadi program yang paling baik menyerap anggaran dengan realisasi sebesar 100% seperti laporan realiasasi anggaran tahun 2015 program Penataan Daerah Otonom Baru juga menyerap anggaran dengan baik.

Tabel 4 Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	959.947.015	0	0%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000	0	0%
3.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30.000.000	28.679.425	95,60%
4.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	1.100.000.000	1.028.368.230	93,48%

5.	Penataan Daerah Otonom Baru	2.359.000.000	2.321.288.285	98,40%
6.	Kerjasama Wilayah Perbatasan	250.000.000	248.524.700	99,41%
	Jumlah	3.739.000.000	3.626.860.640	97,00%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya pada realisasi keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 pada program Penataan Daerah Otonom Baru terjadi penurunan penyerapan anggaran, berbeda dengan tahun sebelumnya realisasi program Penataan Daerah Otonom Baru mencapai target 100% akan tetapi pada tahun 2017 hanya menyerap 98,40%. Kemudian pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur penyerapan anggaran sebesar 0% ini menandakan bahwa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 masih ada dua program yang tidak terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan paparan di atas, dapat terlihat bahwa dari realisasi keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provisi Sumatera Selatan pada tahun 2017 masih menyisakan anggaran, hal ini dapat dilihat dengan adanya penyerapan anggaran yang tidak mencapai target dan terdapat dua program kerja yang tidak terealisasi. Ini menandakan bahwasannya aspek pengelolaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provisi Sumatera Selatan pada tahun 2017 belum bisa dilaksanakan dengan baik. Dana tersebut harusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengingat bahwa penyusunan anggaran ditetapkan berdasarkan anggaran bebasis kinerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **"Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan perumusan masalah penelitian ini yaitu :

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, harapan kami manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan di bidang ilmu administrasi negara terutama mengenai Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

2. Manfaat Praktis

Bagi objek penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai khususnya kinerja pegawai di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola anggaran program dan kegiatan.

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi tulisan mengenai Pengelolaan Anggaran Program dan Kegiatan pada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

‘Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi aplikasi dari pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, P. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Halim, A. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogjakarta:Andi

Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarat: Salemba Empat

Pamungkas. 1972. *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*. Surabaya: Appolo Lestari

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Kompas Gramedia

Siagian, S.1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Soleh, C & Rochmansjah, H. 2010. *Pengelolaan Keuagan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia

Subana. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: Fisip Universitas Sriwijaya

Terry, George, R. 2005. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Terry, G & Rue, L. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Bina Aksara

Peraturan-Peraturan :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 94/PMK 02/2017 Tentang Penunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Skripsi

Husni, A. 2013. *Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Fisip Unsri

Oktami, W. 2012. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012 (Studi pada Balai Diklat Pekerjaan Umum Wilayah VII Palembang*. Palembang: Fisip Unsri

Internet

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/D1513101_bab2.pdf

https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7886/Bab%202.pdf?sequence=10

https://kbbi.web.id/kelola

https://rismaa535.wordpress.com/2015/01/08/pengelolaan-pendidikan-pengertian/